

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Kontroversi Penyerapan Anggaran

Kebon Sirih Tak Sepaham

JAKARTA-Di 2019, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memiliki dana Rp500 miliar untuk pembebasan lahan badan sungai dalam rangka normalisasi ciliwung. Sayangnya, penyerapan anggaran itu hanya terealisasi 20 persen. "Jadi, dapat disimpulkan, ada uangnya sekalipun tetap saja tidak mampu diselesaikan," ujar Wakil Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Justin Adrian.

Selain itu, anggaran yang begitu banyak untuk menanggulangi banjir, kata Adrian, seharusnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggunakannya sebaik mungkin. "Ini masalah kompetensi dan niat baik, dan saya tidak melihat keduanya pada Anies dalam memimpin Jakarta," cetus dia.

Adrian juga menyampaikan, Anies harus mengesampingkan ego, gengsi dan politiknya. Pasalnya, hingga saat ini kursi wakil gubernur DKI Jakarta masih kosong. "Mulai mempekerjakan para profesional yang betul-betul bisa bekerja," kata dia.

Sementara itu, Anggota DPRD DKI Fraksi Gerindra Syarif mengatakan, PSI tidak mengetahui masalah sebenarnya terkait anggaran Pemprov DKI Jakarta. "PSI gak tau masalahnya. pembebasan tanah untuk normalisasi sungai tidak seperti beli kacang goreng," kata dia kepada INDOPOS.

Saat disinggung kurangnya kesiapsiagaan Anies terkait penanganan bencana karena tidak ada peran wakil gubernur, kata Syarif, permasalahan kosongnya kursi wagub dan banjir sangat berbeda jauh.

Kosongnya kursi wagub, kata dia, merupakan urusan politik. Sedangkan persoalan banjir adalah masalah infrakstruktur. "Bisa iya bisa juga tidak (karena kosongnya kursi wagub-red). Sebab urusan wagub merupakan proses politik," tegas Syarif.

Hingga kini, sambung dia, pembahasan kuris wagub DKI masih terus dibahas di partai pengusung. Pihaknya masih membahas bersama PKS dan menunggu kepastian dari PKS untuk calon wagub. "Proses politiknya harus cermat bukan soal keseriusan dan tidak serius. Kita masih nunggu keputusan DPP PKS," tukas dia. (bar)